



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL INSPEKTORAT

Alamat : JL. A. Yani No 173 Slawi Kode Pos 52412
Telepon (0283) 491550 Fax : (0283) 491308 email : inspektorat@tegalkab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN TEGAL NOMOR 023 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023

INSPEKTORAT KABUPATEN TEGAL

- Menimbang : a. berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Daerah;
- b. Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai ketentuan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;

- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Tegal tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal 2009-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Renja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan:
- a. Dokumen operasional tahunan Inspektorat Kabupaten Tegal sebagai pedoman melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023;
 - b. Sebagai dasar penetapan kinerja (PK) Tahun 2023 Inspektorat Kabupaten Tegal;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi

pada tanggal : 4 Agustus 2022



Tembusan ; Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Tegal ;
2. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal ;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Tegal ;
4. Pertinggal.



**RENCANA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
INSPEKTORAT**

JL. A. Yani Slawi No.173 Telp. (0283) 491550 Fax. (0283) 491308 Slawi 52412

Email: inspektorat@tegalkab.go.id

Website: www.inspektorat.tegalkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2023 telah selesai disusun yang merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Pasal 21 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “ Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4)”.

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tegal merupakan dokumen Perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari renstra Inspektorat Kabupaten Tegal dalam aspek perencanaan pembangunan daerah, yang memuat kebijakan, program-program dan kegiatan indikatif Inspektorat Kabupaten Tegal selama kurun waktu satu tahun sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat.

Tersusunnya Rencana Kerja ini tidak terlepas dari partisipasi semua pihak yang ada di Inspektorat Kabupaten Tegal, besar harapan kami agar RENJA ini dapat bermanfaat khususnya bagi Inspektorat Kabupaten Tegal dan yang memerlukannya, guna dijadikan bahan pertimbangan bagi penentu kebijakan.

Slawi, Agustus 2022

Inspektur,



SAIDNO, AP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19720713 199311 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU.....	7
2.1 Evaluasi Capaian Renja Tahun Lalu.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.3 Isu Penting.....	19
2.4 Review Rancangan Awal RKPD	20
2.5 Penelaahan Usulan Masyarakat.....	32
BAB III TUJUAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH.....	33
3.1 Telaah Kebijakan Nasional	33
3.2 Tujuan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	34
3.3 Program dan Kegiatan	38
BAB IV RENCANA KERJA.....	40
BAB V PENUTUP.....	55

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Tegal..	9
Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tegal	17
Tabel T-C.31 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023	22
Tabel Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Tegal	38
Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Dan Prakiran Maju Tahun 2024.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, Inspektorat Kabupaten Tegal merupakan perangkat daerah yang berperan sebagai unsur penunjang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Tegal di bidang pengawasan. Kemudian untuk memberikan arah yang jelas atas pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dalam bentuk program dan kegiatan selama rentang waktu 1 (satu) tahun mendatang, Inspektorat Kabupaten Tegal telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2023.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 telah disesuaikan dan mempedomani berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait, diantaranya adalah : (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (b) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan (d) Peraturan Bupati Tegal Nomor 53 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tegal. Berbagai regulasi tersebut menjadi arahan dalam merumuskan rencana strategis yang sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi Inspektorat, tata cara menyusun perencanaan, dan panduan untuk mengintegrasikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam perencanaan pembangunan.

Renstra Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 yang merupakan rencana jangka menengah tersebut dalam implementasi setiap tahunnya diejawantahkan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tegal, yaitu sebuah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan fungsi pemerintahan di bidang pengawasan. Oleh karena itulah, dalam menyusun Rancangan Akhir Renja Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2023, tentunya didalamnya tersaji program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tegal di bidang pengawasan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 pada tahun ketiga dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2023. Penyusunan Rancangan Akhir Renja ini juga memperhatikan dan diselaraskan dengan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana kerja perangkat daerah di tingkat provinsi dan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang terkait.

Itulah sebabnya, perumusan program dan kegiatan pada Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2023 akan diselaraskan dengan tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2023, Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dan Rencana Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tahun 2023. Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan di tingkat perangkat daerah selaras dengan program pembangunan di tingkat pemerintah daerah, dan program perangkat daerah di tingkat kabupaten dapat bersinergi dengan program pembangunan daerah di tingkat provinsi dan pembangunan nasional di tingkat pusat. Analisis terhadap Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dan Rencana Kerja BPKP Tahun 2023 dilakukan dalam tahapan penyusunan Rancangan Akhir Renja untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten terhadap sasaran perangkat daerah terkait di tingkat provinsi dan lembaga terkait di tingkat pusat.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018-2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal.
23. Peraturan Bupati Tegal Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tegal;

24. Surat Edaran Bupati Tegal Nomor : 050/23/4415/2020 tentang Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.
25. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2023 dimaksudkan untuk menjabarkan rencana pembangunan Inspektorat Kabupaten Tegal tahun 2023 dalam bentuk program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, berikut pendanaan indikatif tahun berkenaan dan prakiraan maju berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 dan evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2023.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2023 adalah:

1. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi program dan kegiatan pengawasan Inspektorat Kabupaten Tegal yang mengarah pada kontribusi pencapaian tujuan pembangunan baik di tingkat provinsi maupun nasional;
2. Terdapat pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis dan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tegal;
3. Terdapat acuan bagi pemangku peran (*stakeholder*) Inspektorat Kabupaten Tegal untuk memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan di bidang pengawasan;
4. Terdapat pedoman untuk pertanggungjawaban Inspektur Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah di bidang pengawasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2023, yang didalamnya memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Tegal tahun 2022 (sampai dengan bulan Agustus), dan capaian tahun (2021), analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dan review terhadap rancangan Akhir RKPD.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat kajian tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Ranhir Renja Inspektorat Kabupaten Tegal, serta program dan kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat rencana kerja dan pendanaan indikatif Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2023.

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, dan kaidah-kaidah pelaksanaandan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Capaian Rencana Kerja Tahun Lalu

Secara umum Inspektorat Kabupaten Tegal telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Bupati untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa..

Pada Tahun 2021 Inspektorat Kabupaten Tegal telah melaksanakan 3 (tiga) program dan 11 (sebelas) kegiatan yang dijalankan oleh Inspektorat Kabupaten Tegal, yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan, yang diejawantahkan melalui kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu;
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan melalui kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, dan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang merupakan program penunjang 2 (dua) program utama, yang terepresentasikan dalam 7 (tujuh) kegiatan yaitu:
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

dengan jumlah anggaran Rp.6.457.785,000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.5.568.627.519,- mencapai 86,23 %.

Realisasi Program / Kegiatan Tahun 2021 belum memenuhi target kinerja hasil /keluaran yang direncanakan, Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Tahun 2021 terdiri dari 3 (tiga) program dan memiliki 11 (sebelas) kegiatan dengan masing-masing indikator dengan capaian dari masing-masing indikator seperti tampak pada tabel T-C.29 sebagai berikut:

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kabupaten Tegal

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8			
6		Urusan Pengawasan Pemerintahan								
6	1	Bidang Urusan Inspektorat Daerah								
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN							
			Persentase tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI	91,00	91,67	92,00	91,96	100%		
			Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Provinsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100%		
			Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten	50,00	55,00	90,00	55,00	61%		
6	01	02	2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil Audit, Monitoring, Reviu, Evaluasi, consalting dan pengawasan lainnya	96 laporan	75 laporan	96 laporan	75 laporan	78%
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan	13 laporan	13 laporan	650%	
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan		2 Laporan	10 Laporan	500%
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan		48 Laporan	10 Laporan	21%
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan		30 Laporan	27 Laporan	90%

6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan			7 Laporan	5 Laporan	71%
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan			7 Laporan	10 Laporan	143%
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan	48 Kasus /Khusus	24 Kasus/Khusus	48 Kasus /Khusus	24 laporan	50%
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan	48 Kasus /Khusus	24 Kasus/Khusus	48 Kasus /Khusus	24 lapran	50%
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						
						Persentase Predikat WBK/WBBM berdasarkan penilaian internal	4,20	4,00	8,30	8,30	100%
						Persentase Pemenuhan IKU Perangkat Daerah	60,00	60	70,00	60	86%
						Persentase PD menyajikan laporan keuangan secara akuntabel	85	85	90	85	94%
6	01	03	2.01		Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawas-an & Fasilitasi pengawas-an	Jmlh kebijakan teknis	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tersusunnya Kebijaksan Pengawasan (JAKWAS) Tersusunnya PKPT	2 dokumen	2 dokumen	2 Dokumen	2 dokumen	100%
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya TPTGR			6 Kasus	4 kasus	67%
6	01	03	2.02		Pendampingan & Asistensi	Terlayannya permintaan pendampingan & Asistensi	100%	100	100%	100	100%
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pendampingan		48 OPD	48 OPD	48	100%
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terwujudnya PD rintisan WBK/WBBM		4 OPD	4 OPD	4	100%

6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terwujudnya renaksi		4 Kegiatan	4 Kegiatan	4	100%
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Hasil Survey		1 Laporan SPI	1 Laporan SPI	1	100%
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.391.000			
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen, Jumlah Pameran	1 dok, 2 pameran	1 dok, 2 pameran	1 dok, 2 pameran		100%
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja, Riview Renstra			1 dok, 2 pameran	1 dok, 1 pameran	100%
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumah dokumen LKJIP, LPPD, LKPJ/AMJ			1 Dokumen	1 Dokumen	100%
6	01	01	2.02		Administra-si Keuang-an Perang-kat Daerah		1 dok	50.000	1 dok		100%
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN			1 Tahun	12 bln	100%
6	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen laporan keuangan			1 Dokumen	1 Dokumen	100%
6	01	01	2.05		Administra-si Kepega-waian Per-angkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	38 APIP	38 APIP	38 APIP	38 APIP	100%
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	38 APIP	38 APIP	38 APIP	38 APIP	100%
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		30 DL, 11 bln, 180 exmplr, 22 jenis, 9 jenis, 4 jenis, 31 item	30 DL, 11 bln, 180 exmplr, 22 jenis, 9 jenis, 4 jenis, 31 item	30 DL, 11 bln, 180 exmplr, 22 jenis, 9 jenis, 4 jenis, 31 item		
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik			31 Jenis	9 Jenis	29
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis ATK			9 Jenis	31 Jenis	344
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis kebutuhan peralatan RT			22 Jenis	22 Jenis	100
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jmlh kebutuhan mamim pegawai			2085 Rapat/T	2085 rapat	100

6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Kebutuhan Cetak ganda			4 Jenis	4 jenis	100
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jmlh Kebutuhan Surat Kabar			180 Exemplar	180 exemplar	100
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat & koord DD & LD			100 Kegiatan	30 kegiatan	30
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Mebeleur R.Irban	Mebeleur R.Irban	-		
6	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan mobil dinas lapangan			-	-	
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis kebutuhan peralatan			1 Gedung 5 Printer 4 AC	-	-
6	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersdianya sarana prasarana kantor(interior, tempat parkir,penataan lingkungan, ruang rapat irban)					
6	01	01	2.08		Peyediaan Jasa Penu-njang Ur-usan Pe-merintah Daerah		3000 surat, 12 bulan	3000 surat, 12 bulan	3000 surat, 12 bulan	3000 surat	100
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jmlh Surat Terkirim			3000 lembar	3000 lembar	100
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jmlh rek Listrik, Air, Internet dan Telpon			12 Bln	12 bln	100%
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Da-erah Pen-unjang Ur-usan Pe-merintah Daerah		19 AC, 30 PC, 30 Printer, 6 Mobil, 19 Motor, 2 gedung	19 AC, 30 PC, 30 Printer, 6 Mobil, 19 Motor, 2 gedung	19 AC, 30 PC, 30 Printer, 6 Mobil, 19 Motor, 2 gedung	19 AC, 30 PC, 30 Printer, 6 Mobil, 19 Motor, 2 gedung	100
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jenis kendaraan yang dipelihara			19 motor 6 mobil	19 motor 6 mobil	100

6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya AC Terpeliharanya Laptop/PC Terpeliharanya Printer			30 PC dan Printer 19 AC	19 AC, 30 PC, 30 Printer	100
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dipelihara			2 gedung	1 gedung	50%

Realisasi Program / Kegiatan Tahun 2021 belum memenuhi target kinerja hasil /keluaran yang direncanakan, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu:

- a. Masa pandemi Covid 19 yang belum berakhir sehingga Pemerintah Kabupaten Tegal mengambil kebijakan refocusing anggaran yang mempengaruhi kinerja perangkat daerah.
- b. Kebijakan Pemerintah Pusat dengan penerapan PPKM darurat dan PPKM level 1, 2, 3 dan 4 yang terus diperpanjang, sangat berdampak pada pelaksanaan kegiatan di lapangan.
- b. Refocusing anggaran masih belum tersistem dengan baik, sebagai contoh adanya pengurangan anggaran tidak diikuti penyesuaian target kinerja.
- c. Sistem Aplikasi yang belum terintegrasi antara perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan, sehingga dalam pelaporan kinerja keuangan dan fisik capaiannya kecil.

Untuk menjamin keberhasilan kinerja 2021 maka rencana tindak lanjut dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Penyesuaian target kinerja dan keuangan untuk mensikapi masa pandemi dan kebijakan PPKM dengan perubahan anggaran;
- b. Perlu adanya strategi pelaksanaan program dan kegiatan yang tepat, efektif dan efisien;
- c. Sistem Informasi yang terintegrasi sehingga pelaksanaan kegiatan lebih efektif dan efisien;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan yang telah dilakukan Inspektorat Kabupaten Tegal dalam rangka terlaksananya tugas pokok dan fungsinya yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan, yang diejawantahkan melalui kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 172.071.500,- dan terealisasi sebesar Rp 125.894.535,- atau 73,16 % dengan realisasi kegiatan berupa:

(1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal;

Pelaksanaan pengawasan internal dilaksanakan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan desa. Mengingat terbatasnya SDM dan anggaran yang ada, pelaksanaan pengawasan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) namun karena adanya pandemi Covid 19 maka pelaksanaan pengawasan berfokus pada pendampingan, asistensi, monitoring dan evaluasi, termasuk monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan monitoring dan evaluasi implementasi pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah.

(2) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu;

Dari target penanganan pengaduan masyarakat sebanyak 48 (empat puluh delapan) aduan kasus, terdapat 27 (dua puluh tujuh) kasus pengaduan yang ditujukan kepada Bupati Tegal, Inspektorat Kabupaten Tegal maupun limpahan dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Selain penanganan kasus pengaduan masyarakat, Inspektorat juga melaksanakan Pemeriksaan Khusus sebagai berikut:

- a. Penelusuran rekam jejak bagi seleksi JPT pratama sebanyak 4 penugasan;
- b. Probiti audit sebanyak 4 penugasan;

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 351.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 254.027.900,- atau 72,37%, dengan realisasi kegiatan berupa:

- (1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.
- (2) Pendampingan dan Asistensi.

Dari keseluruhan program teknis tersebut mendukung pencapaian Indikator Kinerja Sasaran dan tujuan, adapun keseluruhan capaian indikator kinerja sasaran dan tujuan tampak pada table T-C.30 berikut:

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat
Kabupaten Tegal

Indikator	Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Opini BPK			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-	WTP	WTP
Nilai Maturitas SPIP			3,000	3,075	3,075	3,100	3,100	-	3,100	3,100
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN									
		Persentase tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI	91,70	91,00	92,00	92,00	91,32	91,96(Per Juni 2022)	92,00	93
		Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Provinsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100
		Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten	23,77	50,00	60,00	70,00	90,00	50	90,00	95
		Jumlah laporan hasil Audit, Monitoring, Reviu, Evaluasi, consalting dan pengawasan lainnya	100 Laporan	96 laporan	96 laporan	96 laporan	96 laporan	48 laporan	96 laporan	96 laporan
		Jumlah laporan kasus/khusus	71 Kasus /Khusus	48 Kasus /Khusus	48 Kasus /Khusus	48 Kasus /Khusus	48 Kasus	24 Kasus	48 Kasus /Khusus	48 Kasus
Level Kapabilitas APIP			3 DC (3 elemen)	3 DC (2 elemen)	3 DC (1 elemen)	3 DC (1 elemen)	3 DC (3 elemen)	0	3 DC (2 elemen)	3 DC (1 elemen)

	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI									
		Persentase Predikat WBK/WBBM berdasarkan penilaian internal	2,00	4,20	8,30	8,30	0,04	0,00	4,20	8,30
		Persentase Pemenuhan IKU Perangkat Daerah	59,53	60,00	70,00	90,00	0	0	60,00	70,00
		Persentase PD menyajikan laporan keuangan secara akuntabel	0,81	85	90	95	95	0	85	90
		Jmlh kebijakan teknis	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	-	2 dokumen	700.000
		Terlayannya permintaan pendampingan & Asistensi	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%

2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat:

- 1) Pelimpahan tugas mandatory Pemerintah Pusat sebagai tupoksi permanen belum diimbangi pemenuhan sumber daya dan teknologi yang memadai.
- 2) Peningkatan beban kerja dan risiko jabatan dalam menjalankan tupoksi belum berkorelasi langsung dengan perbaikan kesejahteraan aparat pengawas.
- 3) Tuntutan APIP sebagai pilar Reformasi Birokrasi dalam membangun Zona Integritas (ZI) dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) diiringi upaya sistematis dan masif pada seluruh perangkat daerah.

Implementasi kerjasama dengan stakeholder dalam pencegahan korupsi memerlukan pengembangan secara lebih intensif.

Dari permasalahan yang ada diperoleh asumsi sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan tugas pokok fungsi yang bertambah akan dapat dijalankan secara efektif melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya dan teknologi.
- 2) Kompensasi pada peningkatan kesejahteraan aparat pengawas akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan beban kerja dan risiko jabatan aparat pengawas.
- 3) Pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM) dalam reformasi birokrasi secara sistematis dan masif pada seluruh OPD akan mengintegrasikan fungsi APIP sebagai pilar di dalamnya.
- 4) Pencegahan korupsi akan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat apabila terjalin kerjasama yang intensif antara APIP dan seluruh stakeholdernya.

2.4 Review Rancangan Awal RKPD

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tegal yang memuat program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta berpedoman pada Rancangan awal RKPD dan pada Renstra Inspektorat serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Daerah. Anggaran Belanja Inspektorat Kabupaten Tegal dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rencana Anggaran Belanja Tahun 2021 terdiri dari 3 (tiga) Program dan 11 (sebelas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan, semua program, kegiatan dan sub kegiatan telah teranggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat, telah terealisasi sesuai dengan yang direncanakan.
2. Rencana Anggaran Belanja Langsung Tahun 2022 terdiri dari 3 (tiga) Program dan 11 (sebelas) Kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan, semua program, kegiatan dan sub kegiatan telah teranggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat.
3. Rencana Anggaran Belanja Tahun 2023 terdiri dari 3 (tiga) Program yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan 6 (enam) sub kegiatan; Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi 2 (dua) kegiatan yang terdiri dari 6 (enam) Sub Kegiatan dan Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota 7 (tujuh) kegiatan 20 (dua puluh) sub kegiatan, semua program, kegiatan dan sub kegiatan telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2023,

Dari uraian diatas dapat dikemukakan sebagai berikut :

Program yang dilaksanakan pada tahun 2021 yaitu 3 (tiga) program, tahun 2022 yaitu 3 (tiga) program dan Tahun 2023 yaitu 3 (tiga) Program, sedangkan pelaksanaan kegiatan untuk tahun 2021, 2022 dan

2023 tidak ada perbedaan, sebagai berikut: Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023 terdiri dari 11 kegiatan.

Adapun dalam tabel T-C.31 sebagai berikut:

Rancangan awal RKP					Hasil analisis Kebutuhan / Rancangan Akhir Renja					
Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Cat
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
INSPEKTORAT DAERAH				20.000.000.000	INSPEKTORAT DAERAH				18.644.785.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				17.135.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				14.989.785.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tegal			180.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tegal			100.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	80.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	75.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	100.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	25.000.000	

Rancangan awal RKPD					Hasil analisis Kebutuhan / Rancangan Akhir Renja					
Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Cat
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tegal		4.930.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tegal			4.228.428.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bul	4.730.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bul	4.168.428.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	200.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	60.000.000
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tegal		1.250.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tegal			1.500.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	54 Orang	1.250.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	54 Orang	1.500.000.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tegal		1.350.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tegal			950.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	75.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000

Rancangan awal RKPD					Hasil analisis Kebutuhan / Rancangan Akhir Renja					
Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Cat
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	250.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	150.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	75.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	50.000.000	

Rancangan awal RKP

Hasil analisis Kebutuhan / Rancangan Akhir Renja

Rancangan awal RKP					Hasil analisis Kebutuhan / Rancangan Akhir Renja					
Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Cat
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	500.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	400.000.000	
5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tegal			8.000.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tegal			6.636.357.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 mesin potong rumput 1 unit PC 2 unit Proyektor 4 Unit AC 7 Unit TV 10 Unit Printer 20 Unit Laptop	500.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 mesin potong rumput 1 unit PC 2 unit Proyektor 4 Unit AC 7 Unit TV 10 Unit Printer 20 Unit Laptop	600.000.000	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	7.500.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	6.036.357.000	
6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tegal			475.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tegal			575.000.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat yang disediakan	1 Laporan	25.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	1 Laporan	25.000.000	

Rancangan awal RKPD					Hasil analisis Kebutuhan / Rancangan Akhir Renja					
Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Cat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	250.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	300.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	200.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	250.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tegal			950.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tegal			1.000.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dinbayarkan pajaknya Jabatan	10 unit 19 Motor	350.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dinbayarkan pajaknya Jabatan	10 unit 19 Motor	500.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 unit AC 30 unit PC/Laptop 30 unit printer	100.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 unit AC 30 unit PC/Laptop 30 unit printer	100.000.000	

Rancangan awal RKPD					Hasil analisis Kebutuhan / Rancangan Akhir Renja					
Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Cat
Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	500.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	400.000.000	
II				1.715.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				2.560.000.000	
1				1.019.000.000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Tegal			1.860.000.000	
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10 Laporan	115.000.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10 Laporan	50.000.000	
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	11 Laporan	75.000.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	11 Laporan	100.000.000	
Reviu Laporan Kinerja		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	19 Laporan	83.000.000	Reviu Laporan Kinerja		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	19 Laporan	50.000.000	
Reviu Laporan Keuangan		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	39 Laporan	73.000.000	Reviu Laporan Keuangan		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	39 Laporan	35.000.000	
Pengawasan Desa		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	14 Laporan	500.000.000	Pengawasan Desa		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	14 Laporan	1.500.000.000	

Rancangan awal RKPD

Hasil analisis Kebutuhan / Rancangan Akhir Renja

Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Hasil analisis Kebutuhan / Rancangan Akhir Renja					
					Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Cat
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	48 Dokumen	173.000.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	48 Dokumen	125.000.000	
2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Tegal			696.000.000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Tegal			700.000.000	
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	48 Laporan	696.000.000	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	48 Laporan	700.000.000	
III PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				1.150.000.000	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				1.095.000.000	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab. Tegal			350.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab. Tegal			195.000.000	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	150.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	75.000.000	

Rancangan awal RKPD					Hasil analisis Kebutuhan / Rancangan Akhir Renja					
Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Cat
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	200.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	120.000.000	
2 Pendampingan dan Asistensi	Kab. Tegal			800.000.000	Pendampingan dan Asistensi	Kab. Tegal			900.000.000	
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	48 perangkat daerah	250.000.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	48 perangkat daerah	200.000.000	

Rancangan awal RKPD

Hasil analisis Kebutuhan / Rancangan Akhir Renja

Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Cat
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	4 PD (WBK/WBB M)	150.000.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	4 PD (WBK/WBB M)	290.000.000	
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	48 PD (Indeks RB)				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	48 PD (Indeks RB)		
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	48 PD (LHKASN)				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	48 PD (LHKASN)		

Rancangan awal RKPD

Hasil analisis Kebutuhan / Rancangan Akhir Renja

Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Cat
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6 Kegiatan	200.000.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6 Kegiatan	400.000.000	
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	15 perangkat daerah	200.000.000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	15 perangkat daerah	10.000.000	
				20.000.000.000					18.644.785.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tegal tidak ada usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten / Kota.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Kebijakan Nasional

Agar memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan pembangunan setiap tahun dalam jangka 5 (lima) tahun dalam RPJMD Kabupaten Tegal, terlebih dahulu disederhanakan dalam pentahapan pembangunan setiap tahun. Atas dasar tema pembangunan inilah disusun arah kebijakan lebih jelas agar RPJMD mudah dituangkan dalam RKPD. Selanjutnya, tahapan- tahapan dimaksud dijadikan sebagai dasar dan disesuaikan dengan pentahapan RKPD.

Pada tahun 2023 tema Pembangunan mendasar pada visi misi dan program prioritas Bupati terpilih yaitu Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang Menitikberatkan pada Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemulihan Daya Saing Ekonomi. Hal ini menjadi fokus pembangunan karena pemilihan dari dampak pandemi Covid masih menjadi prioritas dan yang terutama Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Inspektorat Kabupaten Tegal mengacu pada tema Pembangunan ini dengan mengutamakan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pengawasan Internal Pemerintahan dengan berbagai Diklat, Bimbingan Teknis dan Pelatihan Kantor Sendiri serta berperan aktif dalam melakukan pengawasan atas pemulihan ekonomi pasca pandemi. Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2023 mendukung arah kebijakan ini dengan berbagai program dan pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat. Tak hanya itu, pelaksanaan Program Kerja Inspektorat juga mendukung 10 Program Unggulan Bupati.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

1. Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam 1 (satu) periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang muncul. Tujuan juga harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi yang dimiliki oleh Inspektorat.

Penguatan pengawasan merupakan bagian integral dari 8 (delapan) area perubahan dari agenda percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang terbingkai dalam Grand Design Reformasi Birokrasi. Secara utuh 8 (delapan) area perubahan dimaksud mencakup :

a. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk secara sistematis dan konsistensi dari sistem dan mekanisme kerja organisasi, pola pikir serta budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik. Target dari program ini adalah terciptanya komitmen dari seluruh elemen pemerintahan untuk melaksanakan reformasi birokrasi, terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja, serta menurunkan resiko resistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

b. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Salah satu program reformasi birokrasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Efektivitas tersebut diantaranya dapat menurunkan tumpang tindih peraturan dari

seluruh tingkatan pemerintahan serta efektivitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan.

c. Penataan dan Penguatan Organisasi

Program penataan dan penguatan organisasi ditujukan untuk mengatasi masalah yang paling sering muncul dari pemerintah terutama dari pemerintah daerah. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan efisiensi organisasi pemerintah daerah secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran.

d. Penataan Ketatalaksanaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing perangkat daerah. Target program penataan ketatalaksanaan adalah meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan manajemen pemerintah, adanya efisiensi proses manajemen pemerintah dan meningkatnya kinerja pemerintahan.

e. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Program ini menjadi salah satu program prioritas dalam reformasi birokrasi yang diharapkan dapat menciptakan SDM yang profesional dan berkompentensi dengan dukungan rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan. Program ini dapat dilaksanakan kegiatan perbaikan system rekrutmen, analisis jabatan, evaluasi jabatan, penyusunan standard kompetensi, assesmen individu dan system penilaian kinerja.

f. Penguatan Pengawasan

Dengan adanya program ini memungkinkan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek KKN pada seluruh instansi pemerintah. Target dari program ini adalah meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan daerah dan

menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang dari pemerintah daerah. Kegiatan yang menjadi prioritas antara lain adalah penguatan kembali peran SPIP dan peningkatan Kapabilitas APIP.

g. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah dengan target akhir yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pemerintah. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target tersebut adalah kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengembangan system manajemen kinerja dan penyusunan indikator kinerja utama (IKU).

h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan Publik menjadi salah satu indikator dalam reformasi birokrasi pemerintah. Program peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dari masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Kegiatan yang dapat mendukung program tersebut adalah dengan menetapkan Standar Pelayanan, Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan survey kepuasan masyarakat.

Selaras dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dijelaskan bahwa pada tahun 2023 diharapkan dapat diwujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme. Selain itu, diharapkan pula dapat diwujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat, harapan bangsa Indonesia yang semakin maju dan mampu bersaing dalam dinamika global yang semakin ketat, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi semakin baik, SDM aparatur semakin profesional, serta *mind-set* dan *culture-set* yang

mencerminkan integritas dan kinerja semakin tinggi. Kemudian pada Tahun 2025, target yang ingin dicapai adalah terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara.

Mempertimbangkan hal-hal di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Tegal pada Rencana Strategis Tahun 2019-2024, adalah: “Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah”. Salah satu fokus yang menjadi area perbaikan 5 tahun mendatang adalah mengoptimalkan penggunaan system informasi dalam mendukung kegiatan pengawasan melalui sistem e-audit.

2. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Inspektorat, atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan.

Sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran pada level eselon II, yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan *medium term outcome* atau *outcome* untuk jangka menengah. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Kabupaten Tegal, maka hasil yang diharapkan terwujud dalam sasaran untuk rancangan akhir renja tahun 2023 adalah:

- a. Tercapainya Nilai 3,10 Maturitas SPIP
- b. Tercapainya Level 3 DC (1 elemen) Kapabilitas APIP;

Adapun Arah Kebijakan Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2023 adalah “Pengintegrasian sistem informasi manajemen di bidang pengawasan melalui pemanfaatan teknologi informasi”.

3.3. Program dan Kegiatan

Sesuai penetapan RKPD Tahun 2023 nomor 66 Tahun 2022 tanggal 11 Juli 2023 dan Surat edaran Mendagri Nomor 910/450/SJ Tanggal 16 Agustus 2021 tentang Kebijakan Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana Anggaran Belanja Tahun 2023, sebesar Rp. 18.644.785.000,- terdiri dari 3 (tiga) Program yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan; kemudian yang kedua adalah Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) Sub Kegiatan dan yang ketiga adalah Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan, semua program, kegiatan dan sub kegiatan telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2023. Adapun alokasi dana di setiap program dan kegiatan dapat di lihat secara sederhana sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Rp	14.419.785.000,00
a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	100.000.000,00
b. Administrasi keuangan perangkat daerah	Rp	4.228.428.000,00
c. Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	1.500.000.000,00
d. Administrasi umum perangkat Daerah	Rp	950.000.000,00
e. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Rp	6.636.357.000,00
f. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp	5.000.000,00
g. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Rp	1.000.000.000,00
2. Program penyelenggaraan pengawasan	Rp	2.560.000.000,00
a. Penyelenggaraan pengawasan Internal	Rp	1.860.000.000,00

- b. Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Rp 700.000.000,00
- 3. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi Rp 1.095.000.000,00
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitas pengawasan Rp 195.000.000,00
 - b. Pendampingan dan Asistensi Rp 900.000.000,00

BAB IV RENCANA KERJA

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan. Secara lebih spesifik, penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) juga dapat digunakan sebagai sarana mengukur keberhasilan kinerja dari eselon II. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD tercapai. Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai atau dituju.

Dalam RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024 terdapat misi yang terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tegal, yaitu Misi kesatu “mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif dalam melayani rakyat”. Untuk melaksan akan misi tersebut terdapat 3 (tiga) program dan 11 (sebelas) kegiatan yang akan dijalankan oleh Inspektorat Kabupaten Tegal, yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan, yang diejawantahkan melalui pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan Tertentu;
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, yang dilaksanakan melalui Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang merupakan program penunjang 2 (dua) program utama, yang terepresentasikan dalam 7 (tujuh) kegiatan yaitu:
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah;
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;

- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah;
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah.

Gambaran pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023, berikut indikator kinerja dan target capaiannya serta besarnya dukungan anggaran untuk berkontribusi mewujudkan tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Tegal 1 (satu) tahun mendatang dapat dicermati dalam table T-C.33 berikut :

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kebutuhan Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
6	1				INSPEKTORAT DAERAH			18,644,785,000				20,000,000,000	
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Inspektorat		100 %	14,989,785,000	Dana Alokasi Umum		100 %	17,135,000,000
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		11 Dokumen	100,090,000	Dana Alokasi Umum		11 Dokumen	180,000,000
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 Dokumen	75,000,000	Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	80,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kebutuhan Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		6 Laporan	25,000,000	Dana Alokasi Umum		6 Laporan	100,000,000
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		55 orang	4,228,428,000	Dana Alokasi Umum		55 orang	5,200,000,000
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		55 Orang/bul	4,168,428,000	Dana Alokasi Umum		55 Orang/bul	5,000,000,000
6	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen	60,000,000	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	200,000,000
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti pendidikan dan Pelatihan		55 orang	1,500,000,000	Dana Alokasi Umum		55 orang	1,250,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kebutuhan Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti pendidikan dan Pelatihan			1,500,000,000	Dana Alokasi Umum		54 Orang	1,250,000,000
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 paket	950,000,000				1,350,000,000
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			50,000,000	Dana Alokasi Umum		1 Paket	75,000,000
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			100,000,000	Dana Alokasi Umum		1 Paket	200,000,000
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			50,000,000	Dana Alokasi Umum		1 Paket	100,000,000
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			200,000,000	Dana Alokasi Umum		1 Paket	250,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kebutuhan Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			100,000,000	Dana Alokasi Umum		1 Paket	150,000,000
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan			50,000,000	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	75,000,000
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	400,000,000	Dana Alokasi Umum		1 Laporan	500,000,000
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	6,636,357,000	Dana Alokasi Umum		100 %	7,730,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kebutuhan Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (AC) Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Genset) Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Komputer All In One) Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Meubelair) Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Scanner) Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Smat TV) Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Soundsystem)		3 Unit 1 Unit 10 unit 1 Paket 4 unit 4 Unt 1 Paket	600,000,000	Dana Alokasi Umum		3 Unit 1 Unit 10 unit 1 Paket 4 unit 4 Unt 1 Paket	230,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kebutuhan Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Paket Garasi 1 Paket Pagar keliling 1 paket taman 1 Unit Gedung	6,036,357,000		Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	1 Paket Garasi 1 Paket Pagar keliling 1 paket taman 1 Unit Gedung	7,500,000,000
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 laporan	575,000,000			1 laporan	475,000,000
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				25,000,000				25,000,000
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	300,000,000			1 Laporan	250,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kebutuhan Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	250,000,000			1 Laporan	200,000,000
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Persentase pemenuhan layanan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah		10 unit 100 %	1,000,000,000			10 unit 100 %	950,000,000
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang		10 unit mobil 19 unit motor	500,000,000			10 unit mobil 19 unit motor	350,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kebutuhan Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		19 unit AC 30 uniiit PC/Laptop 30 unit printer	100,000,000			19 unit AC 30 uniiit PC/Laptop 30 unit printer	100,000,000
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si		1 Unit	400,000,000			1 Unit	500,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kebutuhan Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Provinsi		92% 70% 100%	2,560,000,000				1,715,000,000
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			1,860,000,000				1,019,000,000
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		10 Laporan	50,000,000			10 Laporan	115,000,000
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		11 Laporan	100,000,000			11 Laporan	75,000,000
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		19 Laporan	50,000,000			19 Laporan	83,000,000
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		39 Laporan	35,000,000			39 Laporan	73,000,000
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa		14 Laporan	1,500,000,000			14 Laporan	500,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kebutuhan Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		48 Dokumen	125,000,000			48 Dokumen	173,000,000
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		48 Laporan	700,000,000			48 Laporan	696,000,000
6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		48 Laporan	700,000,000			48 Laporan	696,000,000
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase PD menyajikan laporan keuangan secara akuntabel Persentase Pemenuhan IKU Perangkat Daerah Persentase Predikat WBK/WBBM berdasarkan penilaian internal		89,58 % 70,83 % 16,67 %	1,095,000,000			89,58 % 70,83 % 16,67 %	1,150,000,000
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun		2 rekomendasi	195,000,000			2 rekomendasi	350,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kebutuhan Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		48 PD (Indeks RB) 48 PD (LHKASN)				48 PD (Indeks RB) 48 PD (LHKASN)	
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		6 Kegiatan	400,000,000			6 Kegiatan	200,000,000
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		15 perangkat daerah	10,000,000			15 perangkat daerah	200,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kebutuhan Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun		2 Rekomendasi	75,000,000			2 Rekomendasi	150,000,000
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun		2 Rekomendasi	120,000,000			2 Rekomendasi	200,000,000
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		48 OPD	900,000,000			48 OPD	800,000,000
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		48 perangkat daerah	200,000,000			48 perangkat daerah	250,000,000
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan,		4 PD (WBK/WBB M)	290,000,000			4 PD (WBK/WBB M)	150,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kebutuhan Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TOTAL					18,644,785,000				20,000,000,000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2023 merupakan dokumen yang berisi identifikasi permasalahan, isu strategis, tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun yang bersifat indikatif, sebagai pedoman bagi Inspektorat Kabupaten Tegal dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), guna terselenggaranya tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Karena Rancangan Akhir Renja ini masih bersifat indikatif, maka jika terjadi kekurangan anggaran, harus dilakukan penyesuaian rencana dengan mengurangi kegiatan yang skala prioritasnya lebih rendah atau dengan mengurangi target capaian. Jika ternyata dana yang tersedia melebihi, maka penyesuaian dilakukan dengan perubahan target kinerja dan penambahan kegiatan untuk mendukung sarana dan prasarana kerja.

Rancangan Akhir Renja ini sudah menyelaraskan target dan indikator kinerja yang telah tertuang dalam Renstra, dengan menyesuaikan struktur susunan perangkat daerah yang baru, tugas pokok dan fungsi yang baru, dan perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan, baik pada tingkatan pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan, Inspektorat Kabupaten Tegal tentu tidak dapat melakukannya sendiri. Pelaksanaan kegiatan pengawasan perlu didukung oleh seluruh pemangku peran terkait, baik pimpinan dan staf, serta seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, mitra auditan, mitra sejawat APIP, Aparat Penegak Hukum, serta tak kalah penting adalah komponen masyarakat.

Besar harapan kami, kiranya dokumen Rancangan Akhir Renja ini juga dapat bermanfaat dan menjadi acuan bagi pemangku peran terkait dalam mendukung penyelenggaraan pengawasan pemerintahan menuju terwujudnya birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat melalui reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Tegal. Kritik dan saran membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan demi perbaikan perencanaan dan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tegal yang akan datang.

Slawi, Agustus 2022
Inspektur,

SAIDNO, AP, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197207131993111001

